

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MUHAMMAD MUSHAWIR RAPI

NIM.10500113010

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mushawir Rapi
Nim : 10500113010
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 03 Mei 1994
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Muhjirin II Perm. Maulana Regency No 7A Makassar
Judul : Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, 15 Juni 2017
Penyusun,

Muhammad Mushawir Rapi

NIM : 10500113010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang disusun oleh saudara/i **Muhammad Mushawir Rapi**, NIM: 10500113010, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 4 Juni 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I	(.....)
Munaqisy II	: Rahmah Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil al-'alamin*, *uswatun hasanah* dan suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari alam kebiadaban menjadi alam ber peradaban seperti saat ini.

Keterlibatan banyak pihak dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mereka yang berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama di Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Supardin, M.H. dan Bapak Ashar Sinilele, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Cening Budiana dan Ibu Hj. Nuraeni. selaku hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang penyusun ajukan dan atas saran-sarannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mustari, SH., MH. selaku bagian hukum kemahasiswaan di Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Etta Tercinta Dra. Salmah ZR yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun.
9. Ketiga orang tua tercinta, Ayah dan Ibu Drs. Muhammad Salim Rapi, Rahmawati dan Siti Nurbaya yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta kepada kedua kakak dan adiknya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang terbaik.
10. Teman-teman Mahasiswa/i ILMU HUKUM Angkatan 2013 khususnya kepada Ilmu Hukum A, Terkhusus kepada Satriani S.H, Ahmad Kawakiby, Ruzmadi Zuarna, Muh. Takbir, dan Usman yang telah mendukung dan tak bosan untuk saling menasehati dan membantu penyusunan skripsi ini serta saudara-saudara seperjuangan yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga KKN-R Angkatan 53 Kecamatan Bontolempangan, Desa Lassa - Lassa Kabupaten Gowa, Yang Bernama Yuniar Harvianti, Dewi Kasmira, Muhsinah

Hamid, Rikha Rezky Irjayanti, Muhamin Muis, Mansyur dan Bapak Kepala Desa Awaluddin Hamsah yang selalu memberikan nasehat dan dukungannya kepada penulis.

11. Terima Kasih Sahabatku Moh. Zukri Prasetyo Atas Dukungannya selamanya menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga orang-orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan penulisan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua orang. Amin ya robbal alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 15 Juni 2017

Penulis,

Muhammad Mushawir Rapi
10500113010

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14-58
A. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan	14
1. Pengertian Hukum Waris Islam	14
a. Bentuk – bentuk waris.....	22
b. Sebab-sebab adanya hak mewarisi.....	22
c. Syarat Mewarisi.....	23
d. Penganggur Hak Mewarisi.....	24
e. Golongan Ahli Waris.....	25
2. Pengertian Pengertian Hukum Waris Perdata	27
a. Unsur-Unsur Dalam Pewarisan.....	28

B. Tinjauan Hukum Tentang Dasar Pengangkatan Anak.....	32
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	39
a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	44
b. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak.....	47
c. Tujuan Pengangkatan Anak.....	48
d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	53
 BAB III METODE PENELITIAN	59-61
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	59
B. Metode Pendekatan	59
C. Sumber Data.....	59
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	61
 BAB IV KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN.....	62-80
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Pengadilan Negeri Makassar.....	62
2. Pengadilan Agama Makassar.....	65
B. Ketentuan Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Pembagian Harta Warisan di Kota Makassar.....	68
1. Pengadilan Negeri Makassar.....	69
2. Pengadilan Agama Makassar.....	72
C. Ketentuan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat.....	73
1. Pengadilan Negeri.....	74
2. Pengadilan Agama.....	77
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81

B. Implikasi.....	82
-------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nama : Muhammad Mushawir Rapi

Nim : 10500113010

Jurusan : Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)

Skripsi ini membahas tentang kedudukan Anak Angkat di dalam orangtua angkat yang dimana Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Field Research Kualitatif Deskriptif yaitu metode penelitian lapangan dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data – data yang diperoleh. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Makassar.

Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat implikasi dalam penelitian: Pengaturan mengenai pembagian warisan antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengalami banyak perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Indonesia yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan pun berbeda, hal tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi unifikasi hukum di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Kita ketahui bahwa Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

- a. pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selakunya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri
- b. pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja¹

¹ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika,2001), h. 176.

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum perdata. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Adat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan terhadap hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi;

1. sebagai kontrol sosial dan
2. sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial.

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu

dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang KHI sebagaimana termaktub dalam *diktumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.² Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

Defenisi pengangkatan anak terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 pasal 1 butir 2 tentang pengangkatan Anak, berbunyi :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

² Marzuki Wahid dan Rumadi, *fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm 165.

Di Indonesia diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Perdata, Islam, dan Adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum memiliki Undang – Undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak pula karena faktor sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KUHPerdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH Perdata. Akan tetapi, akibat perang dunia II di Belanda telah lahir Undang – Undang tentang pengangkatan Anak, yaitu : *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917.

Dalam *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.³

Adapun Fatwa Muhammadiyah dan NU mengenai adopsi bahwa:

³ Racmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 190

Anak Angkat tidak boleh di akui dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi, dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.⁴

Di dalam hukum Perdata diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum Perdata mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Kedudukan Anak Angkat dalam islam dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ

⁴ Wasiun Mika, *kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut, Adopsi)*, <http://www.jadipintar.com/2013/08/kedudukan-hukum-dan-hak-waris-angkat-anak-pungut,adopsi.html>

هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda - beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi 2002

pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau

⁷Kompilasi Hukum Islam

memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menuntut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi Hukum barat yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Latar belakang tersebut diatas yang penting diteliti untuk membandingkan KUH Perdata (BW) dan KHI dalam hal warisan terhadap status anak angkat dalam keluarga.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tercapailah *pointer focus* sebagai representasi dari focus penelitian yaitu tentang Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dengan orang tua angkatnya.

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami focus penelitian kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan focus penelitian sebagai berikut.

Anak angkat adalah adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikandan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkunag orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Dari pokok masalah tersebut dapat diuraikan dua sub masalah, yakni :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkatnya?
2. Bagaimanakah sistem pembagian harta warisan terhadap anak angkat ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya – karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :

Studi mengenai perkara kewarisan yang menjadi bagian dari materi hukum perdata di Indonesia telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana Muslim, terlebih lagi dalam hubungannya dengan kewarisan Islam. Namun demikian, penelitian kalangan sarjana yang menulis tentang status kewarisan anak angkat masih dianggap minim, untuk tidak mengatakan tidak ada dalam bentuk buku yang utuh. Setidaknya literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah karya R Wirjono Projodikoro⁸, Muderis Zaini yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan diuraikan

R. Wirjono Projodikoro bukunya yang berjudul *Hukum Waris Di Indonesia* tahun 1966 mengungkapkan bahwa masalah kewarisan merupakan masalah yang berkaitan dengan apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan pendekatan normatif, R.Wirjono menggaris bawahi bahwa terdapat perbedaan antara adopsi di antara orang-orang Tionghoa dan pengangkatan

⁸Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 28

anak menurut hukum Perdata bagi orang-orang Indonesia asli, yaitu perihal hubungan hukum antara anak angkat dan orang tuanya sendiri. Meski dengan berani ia menyatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak kenal anak angkat, dalam kenyataannya menurut pasal 12 dari peraturan itu, anak angkat itu dapat disamakan dengan seorang anak kandung. Adanya ketidak konsistenan inilah yang mempertanyakan secara epistemologis mengenai akar kesejarahan hukum kewarisan bagi anak angkat.

Buku R. Soeroso bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum Perdata* tahun 1993 berupaya melakukan perbandingan antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Namun, melalui tulisannya yang amat sederhana ini, Soeroso hanya menelaah pengangkatan anak sebagai sub pembahasan yang simpel tanpa argumentasi normatif hukum yang memadai. Menurutnya, hukum Islam sudah saatnya untuk memikirkan status anak angkat dan karenanya ia menyarankan agar umat Islam memperbolehkan pengangkatan anak. Namun, dalam kerangka praktisnya tentu tergantung pada situasi dan kondisi dari pengangkatan anak itu sendiri. Oleh karenanya, kedudukannya bisa menjadi *sunnah* atau dianjurkan atau dapat juga sebaliknya menjadi haram atau dilarang. Dalam hal hubungannya dengan orang tua angkat, R. Soeroso memberikan saran agar jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai *hibah* biasa⁹.

⁹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hlm. 177

Dari beberapa literatur di atas, studi mengenai status kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia belum ada yang meneliti secara khusus Jumlah Pembagian Harta Warisan yang di peroleh anak dari orang tua angkatnya. Meskipun ada, sebagaimana literatur-literatur yang telah diterangkan di atas, pembicaraan mengenai kedudukan anak angkat hanya dibahas secara umum dan ditulis dalam kajian, tidak menggunakan analisis perbandingan yang lebih menelaah pada aspek status kewarisan anak angkat. Melalui penelitian inilah, studi mengenai kewarisan anak angkat dari dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia dianggap perlu untuk di telaah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap Orangtua Angkatnya.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman masyarakat tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan.

- b. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Al-mirats (الميراث), dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* (وَرِثَ - يَرِثُ - إِرْثًا - وَمِيرَاثًا). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal yang berkaitan dengan harta benda dan non harta benda. Ayat – ayat al-Qur'an banyak menegaskan, demikian pula sabda Rasulullah saw. Ayat yang berhubungan dengan kewarisan adalah QS al-Naml/27:16.



Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...”¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Bandung, 2006.

Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut.

1. Menyangkut tanggungjawab orang tua dan anak ditemui dalam QS. al-Baqarah/2: 233.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²

2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisannya ditemui dalam QS. an-Nisa'/4: 33, QS. al-Ahzab/33: 6 dan QS. al-Anfal/8: 75.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Bandung, 2006.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.³

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦٠﴾

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Bandung, 2006.

3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS. an-Nisa'/4:

7-14, 34, dan 176⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيَخَشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ

⁴Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 20.

مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
 أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
 حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka): wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi 2002

أَتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ^٦ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^٦ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^٦ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶

Dalam Kompilasi Hukum islam terdapat dalam pasal 171 yang dimaksud dengan hukum *kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Bandung, 2006.

Ahli Waris adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris

Harta Peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhis*), pembayaran utang, dan pemberian kerabat.⁷

Sebelum menguraikan apa yang di maksud dengan harta warisan ada baiknya di utarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut dengan *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan ada sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁸

a. Adapun Bentuk – bentuk waris

Adapun bentuk-bentuk waris sebagaimana di kemukakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni bentuk-bentuk waris sebagai berikut :

⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁸ Muhammad Ali Ash-shabuni, 1988 :41)

- 1) Hak waris Secara *fardh* (yang telah ditentukan bagiannya).
- 2) Hak waris secara *ashabah* (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
- 3) Hak waris tambahan.
- 4) Hak waris secara pertalian rahim.

b. Sebab-sebab adanya hak mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seorang mendapatkan hak waris:

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan *nasab*), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya
- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan tidak terjadi hubungan intim (besenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- 3) *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-itqi* dan *wala an-nimah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang, aka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*. orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak untuk mewarisi terhadap budak

yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (*nasab*) ataupun karena adanya tali pernikahan.

c. Syarat Mewarisi

Adapun syarat mewarisi ada tiga hal :

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

d. Penganggur Hak Mewarisi

Penganggur hak mewarisi seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga

- 1) Budak, seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewaris sekalipun dari saudaranya. Seba segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

- 2) Pembunuhan, Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan menurut mazhab Hanafi.
- 3) Perbedaan Agama, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun Agamanya.⁹

e. Golongan Ahli Waris

1) Dari Golongan Laki-laki

Yaitu ahli waris (yaitu orang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki – laki ada lima belas : (1) Anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) Kakek (dari pihak bapak), (5) Saudara kandung laki-laki, (6) Saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) Paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-lakipaman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

2) Dari golongan Wanita

Adapun ahli waris dari golongan wanita ada sepuluh yaitu : (1) anak perempuan, (2) Ibu, (3) Anak Perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7)

⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, hlm. 38-42

saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.¹⁰

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris dalam islam itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 kelompok laki-laki dan 10 kelompok wanita. Dikatakan secara umum, karena diluar yang 25 tersebut masih ada ahli waris yang lain, dan jumlah yang 25 ini bukanlah *person* (individu) melainkan struktur keluarga dari si mayit (pewaris).¹¹

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ditetapkan kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan Darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, Anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda

¹⁰Muhammad Ash-Shabuni, *Hukum waris dalam islam*, hlm 44-45

¹¹Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, hlm. 79

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah di susun khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul Hukum kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, dan besarnya pembagian warisan terdapat pada pasal 176 sampai pasal 191¹²

2. *Pengertian Hukum Waris Perdata*

Pengertian Hukum Waris menurut Subekti ialah mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal, juga dapat dikatakan, Hukum Warisan Itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap peninggalan seseorang, berhubungan dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris pada lazimnya ditempatkan tersendiri.¹³

Perihal warisan pada umumnya menurut undang – undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Sebagai Ahli Waris menurut ketentuan undang-undang
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut Undang – Undang” atau “*ab intestato*.” Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”¹⁴

¹² Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, hlm.

¹³ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), Hlm. 17

¹⁴ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), Hlm. 95

Dalam hukum waris hukum waris berlaku asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak dan kewajiban kepribadian, misalnya hak dan kewajiban seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seseorang dalam sebagai suatu anggota perkumpulan. Dalam hukum waris berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

a. Unsur-Unsur Dalam Pewarisan

Untuk terjadinya pewarisan seperti dijabarkan di atas maka proses tersebut adalah meliputi unsur-unsur berikut di bawah ini:

1) Adanya Pewaris :

Pewaris yaitu seseorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan atau mengoperkan harta tersebut kepada seseorang sebagai ahli waris. Mengang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal

Menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris¹⁵

a) Ahli waris menurut Undang-undang

Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:¹⁶

- (a) $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
- (b) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
- (c) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- (d) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloting.

Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi,

¹⁵Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), Hlm. 95-96

¹⁶Anistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, hlm.30

terlebih dahulu dibagi dua/kloving sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan $\frac{1}{4}$ dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *abintestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

a. Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami atau isteri

tidak saling mewarisi. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan. Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam sistem hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambei*) sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{25}$ bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).

b. Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan

memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- b) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- c) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.

c. Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila

pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.¹⁷

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):18[11]

- a) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah.
- b) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.

d. Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali

¹⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Hlm. 86-87

tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.¹⁹

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi. Cara pembagian harta warisan golongan keempat sama dengan ahli waris golongan ketiga, yaitu harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu.

b) waris menurut wasiat

Menurut Pasal 874 s.d. Pasal 894, Pasal 913 s.d. Pasal 929 dan Pasal 930 s.d. Pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang, dua orang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. *Erfstelling* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut *testamentaire erfgenaam*. *Testamentaire erfgenaam* adalah ahli waris menurut wasiat.

¹⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 91

Ahli waris dimaksud menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal *onder algemene title*. Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Poris bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris.

Dari keempat golongan ahli waris yang telah diuraikan dan dicontohkan di atas, berlaku ketentuan bahwa golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Karena itu, jika ada golongan kesatu, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak menjadi ahli waris. Jika golongan kesatu tidak ada, maka golongan kedua yang menjadi ahli waris. Selanjutnya, jika golongan kesatu dan kedua tidak ada, maka golongan ketiga atau keempat menjadi ahli waris. Golongan kesatu adalah anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik negara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas dan ke samping sehingga tampak anggota keluarga yang lebih dekat menutup haknya

anggota keluarga yang lebih jauh. Lain halnya seseorang yang mendapat harta warisan melalui surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Akan tetapi, juga seperti ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Adapun peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Berdasarkan hal di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian).
- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi

dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidakcakap untuk menjadi ahli waris.

Sesudah terpenuhi persyaratan di atas, para ahli waris mempunyai kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, ahli waris diberi hak untuk memikirkan selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak harta warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiair* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak harta warisan. Selama ahli waris menggunakan haknya untuk berpikir dalam menentukan sikapnya, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir atau selama empat bulan. Sesudah tenggang waktu menurut undang-undang berakhir maka seorang ahli waris dapat memiliki antara tiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Menerima harta warisan secara penuh

Ahli waris yang menerima harta warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harta warisan harus menanggung segala macam utang-utang pewaris. Penerimaan harta warisan secara penuh yang

dilakukan dengan tegas, yaitu melalui akad autentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh dilakukan dengan diam-diam, biasanya dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

2. Menerima warisan bersyarat

Menerima warisan bersyarat adalah menerima harta warisan dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiair*. Akibat menerima warisan secara *beneficiair* adalah sebagai berikut:

- a) Seluruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- b) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaannya sendiri karena pelunasan utang-utang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- c) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan yang diterimanya.
- d) Apabila utang-utang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa harta peninggalannya maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

1. Menolak harta warisan

- a. Ahli waris yang menolak harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jika ia lebih dahulu meninggal dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak harta warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera

pengadilan negeri wilayah hukum tempat harta warisan itu terbuka. Penolakan harta warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Lain lagi halnya seseorang ahli waris yang menyatakan menerima harta warisan secara *beneficiair* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut:

1. Wajib melakukan pencatat atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
2. Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya.
3. Wajib membereskan urusan harta warisan dengan segera.
4. Wajib memberikan jaminan kepada kreditor pewaris, maupun kepada orang yang menerima pemberian secara *legaat*.
5. Wajib memanggil para kreditor pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

2. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian yaitu sebagai berikut:

1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.

2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.²⁰

B. Tinjauan Hukum tentang Dasar Pengangkatan Anak.

1. *Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak*

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²¹

Menurut Ensiklopedia Umum, anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BWm* hlm. 38-39

²¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, hlm. 31

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.²²

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.²³

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak

²²Surojo Wigidipuro, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 14

²³Muderiz Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Segi Sistem Hukum*, hlm. 85

orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.²⁴

Beberapa definisi serta batasan dari beberapa sarjana yang telah disebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah

²⁴M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h.34.

bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Terdapat berbagai dasar hukum tentang dasar pengangkatan anak yang diuraikan sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak terdapat dalam Al-Qu'ran Surah QS. al-Ahzab/33:

4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

²⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, h. 52.

بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5. Dua ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi; yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah

pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.²⁶

b. Menurut Hukum Adat di Indonesia

Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.²⁷

Motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²⁶ Mustofa Sy, Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), Hlm 21.

²⁷ Muhammad Yasin, “Adopsi Menurut Hukum Adat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat>(09Juni 2010)

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri tapi, juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan lain sebagainya walaupun masih bersifat sangat selektif.

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan si anak, pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi pergeseran kearah kepentingan anak.¹⁶ Dari aneka latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung.

c. Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- a) Pasal 12 (1) : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Pasal 12 (3) : Pengangkatan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Sema Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.

3. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (Tentang Pengangkatan Anak).

2. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggungjawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

- a) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.
- b) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini sebagai kesiapan anak tersebut secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

- a) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

- b) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Menurut Staatblad Tahun 1917 No.129, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan apabila seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik karena pertalian darah maupun karena pengangkatan. Menurut Staatblad ini, pengangkatan anak dilakukan karena dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki. Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”.²⁸

²⁸ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), Hlm 16.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya. Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang

sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak juga berujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.²⁹

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi adoptant, karena adanya alasan:³⁰

- a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.

²⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, hlm. 1-2

³⁰ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm 40

- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orangtua anak, karena adanya alasan :

- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
- d. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain.
- e. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya.
- f. Ingin anaknya terjamin materiil selanjutnya.
- g. Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi.
- h. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah.
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu).
- d. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung.
- f. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- g. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak.
- h. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- i. Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.
- j. Karena si anak sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada,

sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.³¹

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.³²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:

³¹ Mudaris Zain, *Adopsi*, hlm. 63.

³²B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 247

- a. Hubungan darah : mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b. Hubungan waris : dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.

Hubungan perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya

- a. anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
- b. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.

Staatblad 1917 No. 219 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan

pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 11 : “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
- b. Pasal 12 ayat 1 : “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.
- c. Konsekwensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekwensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua

yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekwensi lebih lanjut.³³

- d. Bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdara yang meliputi:

- a. Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdara)
- b. Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara).
- c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.

Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 yang meliputi:

- a. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu :

³³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, hlm. 236

Didalam Pasal 45 dinyatakan bahwa :

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa :

“Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

b. Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak, yaitu:

Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Akibat hukum Pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang angkat dengan orangtua angkat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamatinnya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Field Research Kualitatif Deskriptif yaitu metode penelitian lapangan dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data – data yang diperoleh²

¹ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet Ke 1, 2014, hlm. 17.

²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitati*, Tasiti, Bandung. 1989, hlm 9.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Makassar. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan study deskriptif analitik untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian atau narasumber penelitian.

B. Metode Pendekatan

Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan, Penyusun menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang berusaha mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Diharapkan Penyusun akan menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut .

C. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni di Wawancara secara langsung dengan Hakim yang Menangani tentang

Pengangkatan Anak dan putusan atau penetapan Hakim Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Kota Makassar

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber lainnya dengan masalah yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti³
2. Wawancara yaitu tanya jawab Yang dilakukan secara langsung kepada responden⁴
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta peraturan yang menyangkut tentang Pengangkatan Anak⁵

E. Metode Analisis Data

Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah atau dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu memperbandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

³Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 54

⁴Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58

⁵Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 73

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Makassar

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24' BT-5° 8' 90,7" LS.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini;

Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa;

Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar.

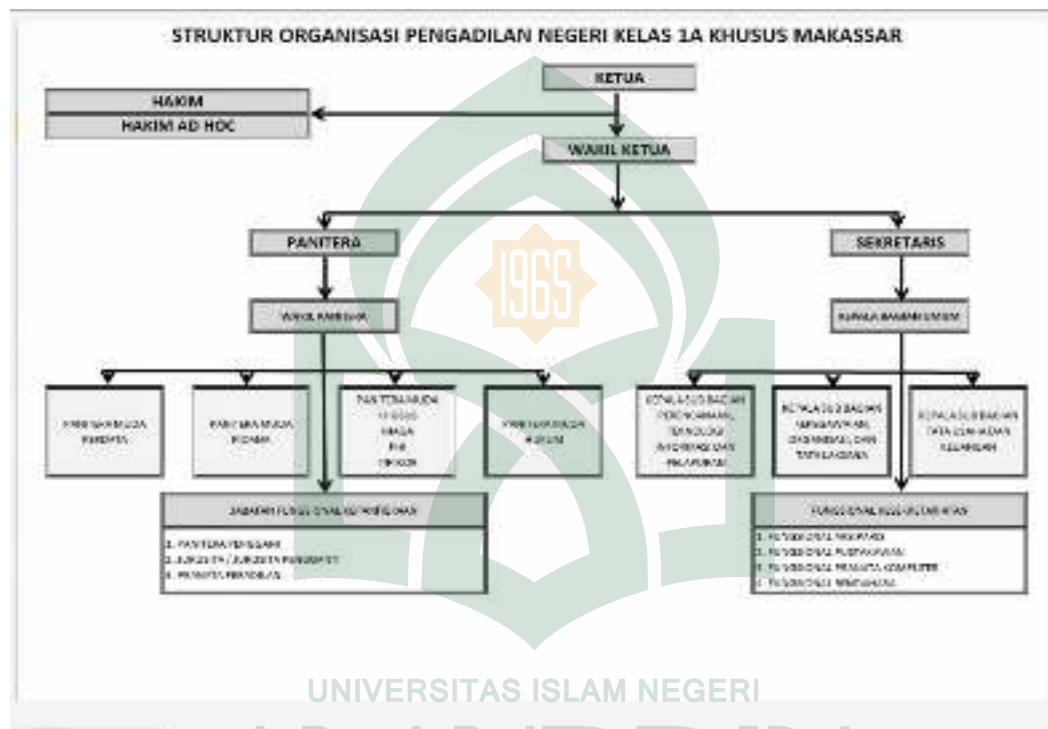
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa) (Asmunandar, 2008).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar.

Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan

bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan.

a. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar



b. Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar



berti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan
t seorang pengadil disebut sebagai Hakim, aka
ah islam, Maka Raja kembali mengangkat

berti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan
t seorang pengadil disebut sebagai Hakim, aka
ah islam, Maka Raja kembali mengangkat

K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

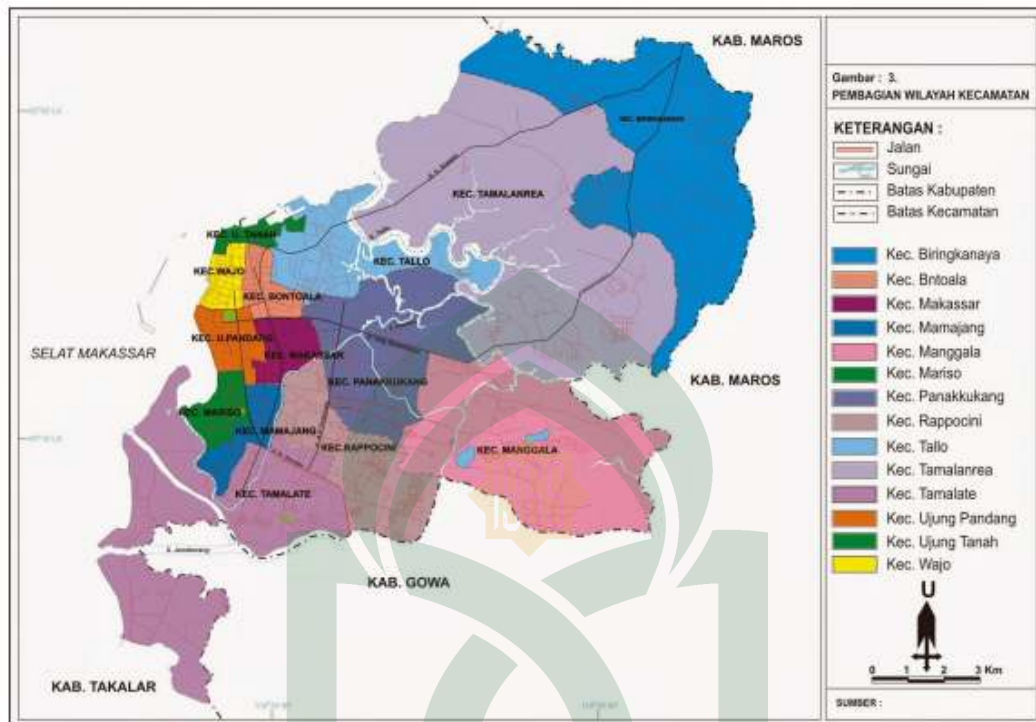
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

a. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.



b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



B. Ketentuan Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan

Setelah penulis melakukan Penelitian di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yang Menangani Perkara Perdata khususnya mengenai pengangkatan anak di kota makassar yang bernama Hj. Nuraeni, S.H, M.H dan Cening Budiana, S.H, M.H dan referensi berupa penetapan dan putusan pengadilan dengan beberapa buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis dapat mengolah data tersebut dan menghasilkan penelitian sebagai berikut sesuai rumusan masalah yang di bahas.

1. Pengadilan Negeri Makassar

Mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUH Perdata, hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang terutama di Kota Makassar, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Dengan demikian, yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang.

Didalam KUHPerdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad*.

Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerdata (*Burgerlijk Weetboek*).

Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai

kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia.

Pengaturan tentang siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, telah ditentukan berdasarkan kaitan keturunan atau adanya hubungan darah/ *ab-instantato* dan berdasar *Testaminteir Erfrecht*. Anak angkat tidaklah mempunyai suatu keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau adanya hubungan darah dengan Adoptan. Sehingga, dengan kedudukan semacam ini, yang dimungkinkan oleh hukum ialah ia bisa menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau ditunjuk berdasar *testament* dari *erflater*. Namun, seiring eksistensi peraturan yang baru yaitu SEMA No. 6/1983 Jis UU No. 23/1992 Jo. PP No. 54/2007 yang dikaitkan dengan pengertian BW mengenai kedudukan anak diluar kawin, maka anak angkat merupakan suatu anak luar kawin yang diakui oleh hukum. Konsekuensi logis dari pengaturan tersebut ialah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 852 BW.

Berdasarkan ketentuan dalam StaatsBlad 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang

sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staats Blad 1917 No.129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam pasal 11, 12, 13 dan 14 dari StaatsBlad 1917 N0. 129 bahwa:

- a. Anak angkat mendapat *Klan* keturunan dari orang tua angkatnya.
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi, sehingga dianggap sebagai anak yang sah
- c. Gugur hubungan Perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandung / biologis.

Hal ini menyiratkan bahwa Anak Angkat mempunyai kedudukan sebagai *Legitimie Portie* atas segala bentuk Harta Waris dan sebagai Ahli Waris yang mutlak. Karena pada hakekatnya, perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :

- a. Kedudukan anak
- b. Pengakuan anak
- c. Pengangkatan anak (adopsi)
- d. Pendewasaan
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua
- g. Perwalian (termasuk harta peninggalan)
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (*alimentasi*).

Pada dasarnya, pewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang timbul karena peristiwa hukum, yang dalam kaidah hukum bersifat mengatur. Oleh karenanya, prinsip *Legitimie Portie* harus didahulukan hak mewarisinya, dengan demikian ketentuan Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament tertulis dari erflater.

2. Pengadilan Agama Makassar

Menurut Hj. Nuraeni sesuai hukum formal di dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada KHI Pasal 171 huruf h di sebutkan :

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris yang diatur dalam Pasal 175 KHI adalah:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak;
- 2) Tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Pengangkatan anak menurut KHI tidak menyebabkan putusya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat didalam KUHPerdara. Dalam hal pewarisan pun, orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Meskipun demikian, hak anak angkat tetap menjadi perhatian di dalam Islam, dimana

pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)

C. Ketentuan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat

Perkara Tentang Pembagian Harta Warisan anak Angkat di Pengadilan Negeri sendiri belum pernah ada kasus sebelumnya menurut hakim cening Budiana di sebabkan karena masyarakat lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau secara Adat Namun Apabila di belakang muuncul kasus Hakim lebih Merujuk kepada sistem pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara dengan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu.

Beda Halnya Dengan di Pengadilan Agama Terdapat beberapa perkara tentang pembagian Harta warisan terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah sesuai dengan hukum formal Islam.

Adapun Perkara atau permohonan yang masuk di pengadilan mengenai pengangkatan Anak yaitu :

Tahun	2014	2015	2016	Jumlah
Pengadilan Negeri	3	1	2	6
Pengadilan Agama	2	2	4	8

Lebih Lengkapnya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Makassar

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917. pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUHPerdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I; a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak- anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel atau Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.⁴ ; b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.
2. Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854 857 KUHPerdata.
3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan

keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III) , maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain.¹

Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu:²

- 1) Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*).

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan

Legitime portie yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestato* ini. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni:

¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, Hlm. 259

² Sunaryo Hadi, *Hukum Kewarisan KUH Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
<http://datarental.blogspot.co.uk/2009/06/hukum-kewarisan-kuh-pedata-bw-dan.html>

- a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*).

Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata, dinyatakan:

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri;

- b. Berdasarkan penggantian (*Bij Plaatvervuling*)

Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris *bij plaatvervuling* ini diatur dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUH perdata.

- 2) Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*)

Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris *adtestamento*. Wasiat atau Testamen dalam KUH Perdata (BW) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Aturan testamen yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa testament tidak

boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata (BW). Dan yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

2. Pengadilan Agama Makassar

Selanjutnya peneliti akan mengkaji sistem pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana di dalam hukum Islam ahli waris pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yakni: (1) *Ashabul furudh*, (2) *Ashabah*, dan (3) *Dzawil Arham*. Dalam KHI terdapat pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 KHI, yaitu:

- 1) Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak

menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.³

Didalam KHI, pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.

³ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 163

- 2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.

Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua (2) syarat yaitu:⁴

Pertama :Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Kedua :Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana di atur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian fiqh hanyalah melalui metode ijtihad *istishlah*, *urf*, dan *Istihsan*. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat indonesia (Misalnya keenganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikarunia i

⁴ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 92

keturunan maka wasiat wajibah untuk orang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Persamaannya anak angkat terhadap pewaris di dalam KUH Perdata dan KHI adalah :
 - a. Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 175 KHI yang berkaitan dengan pembayaran utang pewaris, menunaikan wasiat, pelunasan biaya rumah sakit dan pemakaman, serta beban-beban lain.
 - b. Pengaturan pada Pasal 838 KUH Perdata dan Pasal 173 KHI yang berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisan, diantaranya karena adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh pewaris, memfitnah pewaris, atau menganiaya pewaris, melakukan kejahatan terhadap diri pewaris yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.

Sedangkan Perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam KUH Perdata anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

2. Dalam sistem pembagian harta warisan menurut KUHPerdara, ahli waris terbagi ke dalam empat golongan. Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.

Sedangkan di dalam Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk di dalam golongan ahli waris yang terbagi di dalam tiga golongan yaitu: *Ashabul furudh*, *Ashabah*, dan *Dzawil Arham*. Anak angkat di dalam Pasal 174 KHI juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Guna menyikapi hal tersebut maka anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI. Menurut KUHPerdara bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung. Sedangkan di dalam KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat implikasi dalam penelitian: Pengaturan mengenai pembagian warisan antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengalami banyak perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di Indonesia yang beragam, sehingga hukum yang diterapkan pun berbeda, hal tersebut menyebabkan tidak mungkin terjadi unifikasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Budiono, Racmad, 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Keagamaan Agama Islam Tahun 1997

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, LN 123 Tahun 2007 TLN 4768

Pagar, 1996. "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)", *Mimbar Hukum*, No.29, Th.VII.

Prajadikoro, Wirjono, 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Prof. Subekti, S.H, 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Sapidodadi N.V.

R, Soeroso. ,2001. *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika)

R, Soeroso, 1995. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

R, Subekti, 1997. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pramy Paramita,

Simanjuntak. *Pokok-pokok KUH Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Shabuni, Ash , Ali, Muhammad, 1995. . *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung : Trigenda Karya

Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, t.t)

Syarifuddin , Amir, 1980. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana peranada media grup)

Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Perss, 1985

Usman, Suparno. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta,.

Wahid, Marzuki , Rumadi, 2001. *fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKIS)

Wasiun Mika, *kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut,Adopsi)*, <http://www.jadipintar.com/2013/08/kedudukan-hukum-dan-hak-waris-angkat-anak-pungut,adopsi.html>

Zaini, Muderis, 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **MUHAMMAD MUSHAWIR RAPI**, NIM. **10500113010**, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan (Study Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 7 Juni 2017

Penguji I



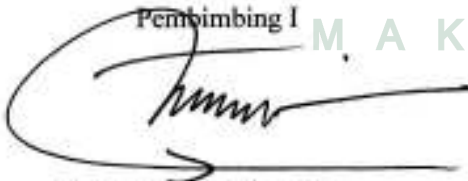
Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I
NIP. 196008171922031001

Penguji II



Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
NIP. 198212072009011010

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.Hi.
NIP. 1966503021994031003

Pembimbing II



Ashar Sinilele, S.H, M.H
NIP. 196917072041411101



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557 Website : www.pa-makassar.net
E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/2455/PB.00/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mushawir Rapi
Nomor Stambuk : 10500113010
Fakultas /Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Jenjang Program : SI (Strata Satu)
Judul : "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan di Kota Makassar (Studi Kasus Menurut KUHP Perdata dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama"

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Juni 2017

Secretaris

Muhammad Naddi S.H., M.H.
NIP. 19671240 19930 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 08 Juni 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 167 /HKM/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MUSHAWIR RAPI
 NIM : 10500113010
 Prog. Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Perdata
 Alamat : Jl. Muhajirin II Perumahan Maulana No. 7A
 Judul Skripsi : "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS MENURUT KUHP PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADIALAN AGAMA)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017.

1. CENING BUDIANA SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tanggal 27 Maret 2017, dengan Nomor : 1550 SI.1/PP.00.9/01/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA

BASO RASYID, SH.MH
 NIP.196112101982031007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul, **“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)”** bernama lengkap . Muhammad Mushawir Rapi, Nim : 10500113010, Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Salim Rapi dan Ibu Rahmawati.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Inpres Sunggumanai Jeneponto pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di MTS.N Binamu Jeneponto tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di MAN Binamu Makassar tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui **Jalur Seleksi Ujian SNMPTN** dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Ilmu Hukum dengan menjabat sebagai Anggota Bidang Penalaran dan Keilmuan Periode 2014-2015, untuk mejalani hobi nya, penulis bergabung dan resmi menjadi anggota UKM Olahraga Cabor Sepakbola pada tahun 2014 di UIN Alauddin Makassar, kemudian menjadi Kordinator Desa KKN UINAM Angkatan 53 pada awal tahun 2017 di desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.